

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) DI KABUPATEN/KOTA SE-JAWA
TAHUN 2018-2019**

**Muhammad Fajar Sulthoni, Andy Dwi Bayu Bawono S.E., M.Si, Ph.D.
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

ABSTRAK

Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penuh bagi tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dikenal dengan Otonomi Daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, meningkatkan kuantitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing serta mengurangi ketidakmerataan pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antar pemerintah pusat dan daerah. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus, pengeluaran modal, dan penerimaan pembiayaan terhadap sisa sisa pembiayaan anggaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten atau kota di Pulau Jawa pada 2018-2019. Metode yang digunakan teknik purposive sampling, jumlah sampel sebanyak 98 laporan keuangan daerah Kabupaten/Kota. Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, dan Bantuan Keuangan mempengaruhi sisa lebih pembiayaan anggaran dengan nilai sig masing-masing sebesar 0,001; 0,000; 0,000. Sementara itu, Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi tidak mempengaruhi sisa lebih pembiayaan anggaran dengan nilai sig masing-masing sebesar 0,446 dan 0,504.

Kata Kunci : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, dan Bantuan Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government gives full authority to each region, be it province, regency/city, to regulate and manage their regional households with as little interference as possible from the central government. This policy is known as Regional Autonomy. Regional autonomy aims to accelerate economic growth and regional development, increase the quantity of

public services so that they are more efficient and responsive to the potential needs and characteristics of each region and reduce the inequality of development that has been going on so far, causing inequality between the central and regional governments. The purpose of this research is to find empirical evidence regarding the effect of local tax revenues, regional levies, special allocation funds, capital expenditures, and financing receipts on the remaining budget financing. The type of research used in this research is quantitative. The population used in this research is districts or cities in Java Island in 2018-2019. The method used was purposive sampling technique, the sample size was 98 district/city regional financial reports. The analytical method uses multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the Special Allocation Fund, Capital Expenditures, and Financial Assistance affect the remaining excess budget financing with a sig value of 0.001 each; 0.000; 0.000. Meanwhile, the General Allocation Fund and Economic Growth did not affect the remaining excess budget financing with sig values of 0.446 and 0.504 respectively.

Keyword : The excess of budget financing, general allocation funds, special allocation funds, capital expenditures and financial assistance, economic growth.

1. PENDAHULUAN

Kemampuan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai kegiatan, hal ini menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Menurut Amandemen Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) bahwa dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) salah satu dana perimbangan dari pemerintah yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Hal ini yang menjadi landasan hukum pelaksanaan desentralisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang membawa perubahan bagi hubungan antar pusat dan daerah (Bawono, 2008).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Suharna (2015) menyebutkan bahwa dari komponen-komponen APBD, yang berpengaruh besar terhadap SILPA berasal dari pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, dana transfer dari

pemerintah pusat, serta pendapatan lain yang sah. Hal ini sesuai dengan penelitian Kumorotomo (2010), yang menyatakan bahwa besarnya SILPA menunjukkan belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.

Adapun tujuan ekonomi yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi adalah dengan adanya kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan melakukan kebijakan tersebut penganggaran dan realisasi keuangan daerah dapat terlaksana dengan optimal untuk kesejahteraan umum di daerah tersebut. Sistem desentralisasi juga merupakan bentuk upaya demokrasi antara pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat daerah untuk bisa turut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu sistem desentralisasi juga dapat membantu pemerintah daerah untuk mencetuskan berbagai program baru yang tentunya sebagai upaya perbaikan ekonomi sosial di tingkat daerah, dimana semua itu masih dalam rangka untuk membantu mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Berdasarkan gagasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) di KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TAHUN 2018-2019”**

2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori yang melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka-angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. diperoleh dari website dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI yang berisikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2018-2019, Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten tahun 2018-2019, dan Pertumbuhan Ekonomi setiap Kabupaten di Jawa tahun 2018-2019.

Pengumpulan data adalah kegiatan pertama penelitian yaitu memperoleh dan menghimpun data-data yang ada di lapangan melalui website resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI <https://djpk.kemenkeu.go.id> & Badan Pusat Statistik Indonesia <https://www.bps.go.id> . Untuk pembatasan waktu data yang dikumpulkan peneliti yaitu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018-2019, Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten tahun 2018-2019 dan Pertumbuhan Ekonomi setiap Kabupaten di Jawa tahun 2018-2019.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan food and bavarage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2019. Total populasi sebesar 26 perusahaan manufaktur dengan menggunakan metode *purposive sampling*, maka data yang dijadikan sampel sebesar 12 perusahaan food and bavarage yang memenuhi kriteria penelitian selama periode 2015-2019. Berdasarkan uji asumsi klasik, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.1
Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Uji Normalitas	Uji Multikolinearitas		Uji Autokorelasi	Uji Heterokedastisitas
		Toleransi	VIF		
DAU	Asymp.	0,126	7,941	Durbin-Watson 0,135	0,236
DAK	Sig. (2-tailed) 0,200	0,154	6,474		0,608
Belanja Modal Bantuan Keuangan		0,364	2,747		0,423
Pertumbuhan Ekonomi		0,979	1,022		0,524
DAU		0,126	7,941		0,236

Sumber: Hasil olah data 2020

Berdasarkan Uji Asumsi Klasik didapat hasil Uji Normalitas dengan *Kolmogrov-smirnov* sebesar $0,200 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa

model regresi terdistribusi normal karena memenuhi asumsi normalitas atau dapat dikatakan sebaran data dalam penelitian ini digolongkan terdistribusi normal. Selanjutnya, hasil Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (likuiditas, struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, risiko bisnis) memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas bahwa seluruh variabel independen (likuiditas, struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, risiko bisnis) memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel pada model regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil Uji menunjukan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,135 yang berarti bahwa lebih besar dari (>) 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi..

Tabel 4.2
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Variabel	Coefficient
(Constant)	184763,214
DAU	-0,098
DAK	0,280
Belanja Modal	0,594
Bantuan Keuangan	-0,380
Pertumbuhan Ekonomi	-33888,286

Sumber: Hasil olah data 2020

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel 4.7 diatas, maka persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$SILPA = 184763,214 - 0,098 \text{ DAU} + 0,280 \text{ DAK} + 0,594 \text{ BM} - 0,380 \text{ BK} - 33888,286 \text{ PE}$$

Persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Konstanta memiliki koefisien regresi dengan arah positif 184763,214 hal ini menunjukkan bahwa jika variable DAU, DAK, Belanja Modal, Bantuan Keuangan, dan Pertumbuhan Ekonomi diasumsikan konstan atau sama dengan 0 maka nilai SILPA akan mengalami peningkatan.

- b. DAU (Dana Alokasi Umum) memiliki koefisien regresi dengan arah negatif - 0,098 hal ini berarti bahwa setiap kenaikan DAU maka SILPA akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya apabila terjadi penurunan DAU maka akan SILPA akan mengalami peningkatan.
- c. DAK (Dana Alokasi Khusus) memiliki koefisien regresi dengan arah positif 0,280 hal ini berarti bahwa setiap kenaikan DAK maka akan meningkatkan SILPA, begitu sebaliknya apabila terjadi penurunan DAK maka SILPA akan mengalami penurunan.
- d. BM (Bantuan Modal) memiliki koefisien regresi dengan arah positif 0,594 hal ini berarti bahwa setiap kenaikan bantuan modal maka akan SILPA, begitu pula sebaliknya apabila terjadi penurunan bantuan modal maka SILPA akan mengalami penurunan.
- e. BK (Bantuan Keuangan) memiliki koefisien regresi dengan arah negatif - 0,380 hal ini berarti bahwa setiap kenaikan bantuan keuangan maka SILPA akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya apabila terjadi penurunan bantuan keuangan maka akan SILPA akan mengalami peningkatan.
- f. PE (Pertumbuhan Ekonomi) memiliki koefisien regresi dengan arah negatif - 33888,286 hal ini berarti bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi maka SILPA akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya apabila terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi maka akan SILPA akan mengalami peningkatan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh DAU terhadap SILPA

Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,730 dan nilai signifikansi sebesar 0,466 lebih besar dari toleransi kesalahan $\alpha = 0,05$ yang berarti bahwa variabel DAU tidak berpengaruh terhadap SILPA, sehingga **H1:Ditolak**.

Hal ini membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Dana Alokasi Umum memiliki peran sangat kecil terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Dikarenakan fungsi utama dari Dana Alokasi Umum adalah merupakan transfer yang bersifat umum (block

grant) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fadillah, 2017). bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran.

3.2.2 Pengaruh DAK terhadap SILPA

Hasil statistik uji t untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,477 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari toleransi kesalahan $\alpha = 0,05$ yang berarti bahwa variabel DAK berpengaruh terhadap SILPA, sehingga **H2:Diterima**.

Hal ini membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Apabila semakin besar realisasi transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat maka tingkat pencairan anggaran daerah semakin tinggi sehingga sisa lebih pembiayaan anggarannya kecil, sebaliknya semakin kecil realisasi transfer dana alokasi khusus dari pemerintah maka tingkat pencairan anggaran rendah sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran akan semakin besar.

3.2.3 Pengaruh belanja modal terhadap SILPA

Hasil statistik uji t untuk Belanja Modal (BM) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6,550 nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari toleransi kesalahan $\alpha = 0,05$ yang berarti bahwa variabel belanja modal berpengaruh signifikan terhadap SILPA, sehingga **H3 : Diterima**.

Hal ini membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Apabila semakin kecil sisa belanja modal dari pemerintah yang direncanakan dengan baik, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar sisa belanja modal dari pemerintah pusat yang diakibatkan tingkat perencanaan daerahnya kurang baik sehingga menyebabkan sisa lebih pembiayaan anggarannya semakin besar.

3.2.4 Pengaruh bantuan keuangan terhadap SILPA

Hasil statistik uji t untuk Bantuan Keuangan (BK) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -4,448 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih besar dari toleransi kesalahan $\alpha = 0,05$ yang berarti bahwa bantuan keuangan berpengaruh negatif terhadap SILPA, sehingga **H4: Diterima**.

Hal ini membuktikan bahwa bantuan keuangan berpengaruh negatif terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Semakin besar bantuan keuangan menyebabkan sisa lebih pembiayaan anggarannya semakin kecil dikarenakan mudah untuk di buat surat pertanggung jawabannya.

3.2.5 Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap SILPA

Hasil statistik uji t untuk Pertumbuhan Ekonomi (PE) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,669 dan nilai signifikansi sebesar 0,504 lebih besar dari toleransi kesalahan $\alpha = 0,05$ yang berarti bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap SILPA, sehingga **H5 : Ditolak**.

Hal ini membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Pertumbuhan Ekonomi memiliki peran sangat kecil terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Dikarenakan pertumbuhan ekonomi lebih berpengaruh terhadap belanja modal tidak berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang baik harus diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang baik pula. Ketika pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat bisa diindikasikan belanja modal daerah tersebut cukup besar.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat diambil kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. DAU tidak berpengaruh terhadap SILPA dengan tingkat signifikansi sebesar 0,446 lebih dari 0,05 sehingga H1 ditolak.
2. DAK berpengaruh positif terhadap SILPA dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 kurang dari 0,05 sehingga H2 diterima.

3. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap SILPA dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga H3 diterima.
4. Bantuan Keuangan berpengaruh positif terhadap SILPA dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga H4 diterima.
5. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap SILPA dengan tingkat signifikansi sebesar 0,504 lebih dari 0,05 sehingga H5 ditolak.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Keterbatasan tersebut meliputi antara lain :

1. Penelitian ini hanya menggunakan dua periode laporan keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa yaitu pada periode 2018-2019, sehingga kurang mampu menggambarkan kondisi perusahaan secara keseluruhan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen yaitu DAU, DAK, Belanja Modal, Bantuan Keuangan, dan Pertumbuhan Ekonomi.
3. Dari hasil pengujian koefisien determinasi dapat disimpulkan bahwa kelima variabel independen dalam penelitian ini hanya mempengaruhi variabel dependen sebesar 49,8%

4.3 Saran

Saran-saran yang diberikan kepada penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut

1. Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel sehingga disarankan penelitian selanjutnya menambahkan variabel penelitian.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan objek penelitian, sehingga hasil penelitian berguna dan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhammad Iqbal, 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Aditiya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada*

- Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2015. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1).
- Danil, Herlina 2021. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019. Universitas Negeri Padang.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Eka Agustiani 2020. *Determinan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2018*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.
- FahmiCandra, 2020 *AnalisisFaktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Di Kabupaten/kota Se-Jawa Tahun 2014-2017*. Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Frelistiyani, W. (2010). *Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*.
- Hardiana A. Bawono. 2018. “Pengaruh Perubahan Pendapatan, Realisasi Dana Alokasi Khusus Dan Perubahan Pembiayaan Terhadap SILPA”. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Halim, A. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Ida Ayu Gede Sutha Megasari, 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan Flypaper Effect pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran*.
- Izudin, H., Syaparudin., Dan M. Syamsudin. H. 2013. “Kinerja Keuangan Daerah Dan Hubungan Dengan Silpa Di Kabupaten Bungo”. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol. 1 No.1.
- Kamelia M. 2017. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dan Strategi Untuk Meminimalisirnya Pada APBD Kabupaten Bogor”. *Thesis*. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Kusnandar, dan D. Siswanto. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. *Jurnal Uni-versitas Indonesia*.

- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta, Erlangga.
- Mayasari, Luh Putu Rani, dkk. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten Buleleng. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*. Vol. 2, No.1 Tahun 2014.
- Nainggolan, Benny Rojeston Marnaek. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal AKRAB JUARA Yayasan Akrab Pekanbaru*.
- Nofrizal, Egi, Akhsanul Haq, and Sigit Edi Surono. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2015." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang*.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS).
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pembiayaan.
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Purwanto, F. D. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Studi Kasus Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2008–2011. *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Pradana, I. P. Y. B. (2014). Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 18(2), 185–201.
- Priambudi, W. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(1), 136-147.
- Ramadhan, M.F.A. 2015. "Pengaruh Realisasi, Perubahan Anggaran dan Temuan Audit Terhadap SiLPA Pemerintah Daerah di Indonesia". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Ratna I. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 18, No. 2 Juli Desember 2015.

- Sugiantini, N.L.A. 2015. “Kecenderungan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal di Kabupaten Buleleng Periode 2009-2013”. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*. Volume: 5. Nomor. 1 Tahun 2015.
- Suharna, I. 2015. “Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada APBD Pemerintah Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2007 s.d. 2013”. Tesis. Universitas Gajdah Mada. Yogyakarta.
- Suhendra, Made Dwi Septiadi, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Made Pradana Adiputra. 2015. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Pemeliharaan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Bali Periode 2009-2013”. *E-journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha*, Vol.3(1)
- Sukarno A, Hadioetomo, Haryadi A. 2019. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Anggaran Belanja Modal”. UPN Veteran Yogyakarta.
- Undang – Undang (UU) No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- UU No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- UU No 1 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Yana, Widya. (2018). Pengaruh PAD, DAU, DBH, dan DOK Terhadap Belanja Modal Dengan SILPA sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Skripsi. Universitas Sumatera Utara Repositori Institusi
- Yovita, F. M., & Utomo, D. C. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008– 2010) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro)
- Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Ruserlisyani, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada

- Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220-238
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 19(1), 1–16
- Winarni, N.S. 2013. “Pengaruh Faktor-Faktor dalam Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Pemerintah Kota Tarakan”. Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.